

The Effect of Education, Economic Growth, Labor and City Minimum Wages on Poverty in the Ex-Residency of Surakarta in 2017-2021

Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten Kota Terhadap Kemiskinan di Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2017-2021

Salwa Nur Azizah^{1*}, Eni Setyowati²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Salwanurazizah706@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze how much influence Education, Economic Growth, Labor, District/City Minimum Wages have on Poverty in Surakarta Residency in 2017-2021. Poverty as a related variable, while education, economic growth, labor and district/city minimum wages are independent variables. The analytical technique used is panel data regression analysis using the Eviews 10 program computer. This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency for a period of 5 years starting from 2017-2021. This research is expected to be a material consideration for policy making for local governments in the formulation of a policy to reduce poverty

Keywords: Poverty, Education, Economic Growth, Labor, District/City Minimum Wage

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Kemiskinan di Karesidenan Surakarta tahun 2017-2021. Kemiskinan sebagai variabel Terkait, Sedangkan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagai variabel bebas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan perangkat komputer program Eviews 10. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung tahun 2017-2021. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam perumusan suatu kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota

1. Pendahuluan

Pembangunan adalah hasil upaya berkelanjutan masyarakat di bidang ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, pendidikan dan industri yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan biasanya dilakukan melalui proses pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu tujuan pembangunan adalah pengentasan kemiskinan,. Kemiskinan telah menjadi perhatian pemerintah setiap negara terutama di negara berkembang khususnya Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di suatu negara dipandang sebagai masalah serius karena kemiskinan yang ada saat ini belum sepenuhnya teratasi [1]

Kemiskinan merupakan masalah global yang menjadi perhatian masyarakat di dunia. Negara miskin masih dihadapkan dengan masalah pertumbuhan dan distribusi yang tidak merata. Banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun kurang memberikan manfaat bagi penduduknya sehingga masih mengalami kemiskinan yang sangat tinggi. Kemiskinan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papan saja melainkan juga tercukupi indikator kesehatan dan pendidikan [2]

Di negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan permasalahan yang umum terjadi. Banyak sekali negara dalam kategori ini memiliki tugas untuk menumpas kemiskinan dan memakmurkan masyarakatnya [3]

Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Karesidenan Surakarta merupakan salah satu Karesidenan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun perekonomian di Karesidenan Surakarta selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun tetapi kemiskinan tetap menjadi masalah. Tabel 1-1 memperlihatkan jumlah kemiskinan di Karesidenan Surakarta dari tahun 2017-2021

Tabel 1- 1
Jumlah Penduduk Miskin di Eks- Karesidenan Surakarta
Periode 2017-2021 (ribu jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Surakarta	54,89	46,99	45,18	47,03	48,79
Kab. Boyolali	11,96	10,04	9,53	10,18	10,62
Kab. Sukoharjo	8,75	7,41	7,14	7,68	8,23
Kab. Karanganyar	12,28	10,01	9,55	10,28	10,68
Kab. Wonogiri	12,90	10,75	10,25	10,86	11,55
Kab. Sragen	14,02	13,12	12,79	13,38	13,83
Kab. Klaten	14,15	12,96	12,28	12,89	13,49

Sumber : BPS Jawa Tengah 2020, data diolah

Tabel 1-1 memperlihatkan jumlah kemiskinan di Karesidenan Surakarta tahun 2017-2021, dari ketujuh wilayah di Karesidenan Surakarta jumlah tertinggi kemiskinan menempati posisi di Surakarta dengan jumlah kemiskinan mencapai 54,89 jiwa, dan tahun 2019 turun menjadi 45,18 jiwa. Sedangkan jumlah kemiskinan terendah diduduki Sukoharjo dengan jumlah kemiskinan di tahun 2017 8,75 juta jiwa, dan di tahun berikutnya selalu mengalami penurunan, di Kabupaten Boyolali, kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen jumlah penduduk miskin saling beringan, dan di wilayah Sukoharjo di tahun 2017-2021 jumlah kemiskinan cukup rendah di tahun 2019 jumlah rakyat 7,14 juta jiwa.

Todaro (2021) menyatakan upah yang rendah di bawah minimum akan menyulitkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan ada yang tidak mencukupi untuk biaya hidup sehingga menimbulkan kemiskinan. World Bank (2021) menunjukan salah satu faktor kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima Di samping itu faktor kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Sinaga (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PDRB per kapita, ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan IPM terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita, ketimpangan distribusi pendapatan dan IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. PDRB per kapita, ketimpangan distribusi pendapatan, pengangguran dan IPM secara simultan mempengaruhi kemiskinan [5]

Penelitian oleh Putri (2021) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Anak menggunakan model regresi data panel dengan melakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, (2) tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, (3) pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan (4) pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia [6]

Penelitian oleh Rozani (2012) Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dengan kemiskinan. Ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka angka kemiskinan akan turut meningkat. Sebaliknya, ketika laju pertumbuhan ekonomi turun maka angka kemiskinan akan turun. Dari hasil regresi variabel PDRB memiliki koefisien regresi sebesar 0.13 dengan angka sig. sebesar 0.556 lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0.05 yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. Setiap penambahan 1 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara sebesar 0.556 persen. dan sebaliknya jika produk domestik regional bruto (PDRB) berkurang 1 persen maka akan menyebabkan penurunan tingkat penduduk miskin Provinsi Maluku Utara sebesar 0.556 persen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, penelitian ini akan memusatkan pengamatan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, upah minimum Kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta tahun 2017-2021.

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Kemiskinan mengandung tiga perspektif yang luas: pendekatan terhadap pekerjaan, kebutuhan dasar, dan pendekatan terhadap kemampuan. Pendekatan terhadap pendapatan dan kebutuhan dasar sebagian besar dicirikan oleh ukuran kuantitatif, sedangkan indikator kuantitatif dan kualitatif menggambarkan pendekatan kapasitas manusia. Pendekatan kemampuan biasanya mencakup lebih banyak metrik kualitatif yang menggabungkan pendekatan terhadap pendapatan dan pendekatan terhadap kebutuhan dasar [8]

Chambers dikutip oleh Suryawati (2005) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan satu kesatuan kerangka dengan lima ukuran, yaitu: (1) kelayakan; (2) ketidakberdayaan; (3) keadaan genting; (4) depedensi; dan (5) isolasi baik dalam aspek kemasyarakatan maupun aspek geografis. Kuncoro (1997) menyebutkan aspek-aspek yang memicu timbulnya kemiskinan antara lain : 1) kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan sebagai akibat dari kepemilikan sumber daya yang tidak merata; 2) kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kapabilitas sumber daya manusia; 3) kemiskinan muncul disebabkan oleh akses modal yang tidak merata. Sedangkan Kurnianingsih (2012) menyebutkan bahwa terdapat dua penyebab kemiskinan yaitu : 1) kemiskinan yang terjadi karena faktor alamiah dimana terdapat keterbatasan sumber daya alam, rendahnya pemanfaatan kemajuan teknologi serta musibah yang sewaktu-waktu dapat terjadi; 2) kemiskinan artifisial yang terjadi karena adanya lembaga masyarakat yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat mendominasi struktur ekonomi dan layanan lain yang tersedia.[9]

Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan tingkat pendidikan yang lebih baik membantu kemampuan kerja, Dengan demikian, pendidikan diakui sebagai alat fundamental untuk mencegah dan mengangkat orang dari kemiskinan [10]

Teori – Teori Tentang Pendidikan

1. Behaviorisme

Asumsi filosofis dari Behaviorisme adalah *nature of human being*, yakni manusia tumbuh secara alami. Menurut paham ini, pengetahuan pada dasarnya diperoleh dari pengalaman. Aliran Behaviorisme berdasarkan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Oleh karena itu aliran ini berusaha menerangkan dalam pembelajaran bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku.

2. Kognitivisme

Teori pendidikan kognitivisme ini didasarkan atas rasional. Pengetahuan didapat dari pemikiran yang rasional. Menurut aliran ini kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita dalam menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam lingkungan.

3. Konstruktivisme

Menurut teori ini yang menjadi dasar bahwa siswa memperoleh pengetahuan karena keaktifan siswa itu sendiri. Menurut teori konstruktivisme, konsep pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru dan pengetahuan baru berdasarkan data.

4. Konsep Pembelajaran

Dalam keseluruhan konsep pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan mencapai tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Institusi pendidikan harus dapat menyelenggarakan proses pembelajaran berlangsung dengan efektif

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala propinsi atau kabupaten/kota [11]

Tenaga kerja

Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja [12] Tenaga kerja dalam arti menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha. Lapangan usaha yang tersedia tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam kondisi yang siap pakai. Disinilah perlunya peranan pemerintah untuk mengatasi masalah kualitas tenaga kerja melalui pembangunan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK, serta pelatihan keterampilan dan wawasan yang luas sehingga mempermudah proses penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan [13]

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sisi, salah satunya dari ketenagakerjaan. Pada dasarnya tujuan seseorang untuk bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), sebab ketenagakerjaan dapat menjadi sumber masalah kemiskinan. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang berstatus tidak bekerja lebih banyak, maka akan berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan daerah akan menjadi jalan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi [14]

Upah minimum

Upah Minimum merupakan usaha untuk memperbaiki penghidupan penduduk yang berpendapatan rendah, terutama bagi pekerja yang tergolong miskin. Semakin meningkat upah minimum,

maka akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat Upah merupakan salah satu sumber pendapatan, jika sumber pendapatan berkurang atau tetap sama, maka kesejahteraan juga akan berkurang atau tentunya akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan [15]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskripsi kuantitatif, penelitian yang menjelaskan fenomenal kondisi secara faktual akurat dan sistematis penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, pertumbuhan ekonomi, Tenaga kerja, Upah Minimum terhadap kemiskinan di Karesidenan surakarta tahun 2020-2021 yang terdiri dari 7 Kabupaten di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel yang diolah melalui program *Eviews*. Data panel adalah gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Model ekonometrinya sebagai berikut [16]

$$\log Pov_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log Pend_{it} + \beta_2 Pe_{it} + \beta_3 \log Tk_{it} + \beta_4 \log UMK_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

di mana :

<i>POV</i>	= Kemiskinan
<i>PEND</i>	= Pendidikan
<i>PE</i>	= Pertumbuhan Ekonomi
<i>TK</i>	= Tenaga Kerja
<i>UMK</i>	= Upah Minimum Kabupaten/Kota
β_0	= Konstan
β_1, \dots, β_4	= Koefisien Regresi Variabel Independen
ε	= error term (Faktor Kesalahan)
<i>t</i>	= tahun ke <i>t</i>
<i>i</i>	= Karesidenan Surakarta

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 5 Variabel, yaitu 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan Pendidikan, Pertumbuhan ekonomi, Tenaga Kerja, Upah Minimum sebagai variabel independen. Tersedianya definisi operasional variabel agar memudahkan dalam menjelaskan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini variabel tersebut sebagai berikut : Kemiskinan merupakan variabel Dependen (Y), dan variabel independen terdiri dari Pendidikan (X1), jumlah rata rata banyaknya orang yang bersekolah di EKS- Karesidenan Surakarta data diambil dari BPS (dalam persen), Pertumbuhan Ekonomi (X2) Merupakan data statistika yang meragkum perolehan nilai seluruh kegiatan ekonomi di wilayah provinsi menggunakan PDRB harga konstan di Eks- Karesidenan Surakarta menurut data BPS (Dalam satuan Persen), Tenaga Kerja (X3) banyaknya jumlah pekerja kurang waktu 2017-2021 data di ambil dari BPS (dalam ribu jiwa), Upah Minimum (X4) Besaran tingkat upah yang ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam kurung waktu 2017-2021 menurut data BPS (Satuan Rupiah).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Regresi Model Terpilih

Uji Chow dan uji Hausman digunakan untuk memilih model terestimasi terbaik antara CEM, FEM, dan REM. Apabila pada Uji Chow model yang terpilih adalah FEM dan pada Uji Hausman model yang terpilih juga FEM maka model terestimasi terbaik adalah FEM.

Tabel 2-2
Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

$\log Pov_{it}$	=	7,3417	-0,0584	$\log Pend_{it} + 0,0001 PE_{it} +$
$0,0033 \log TK_{it} - 0,3159 \log UMK_{it}$				
(0,0643)***		(0,2534)	(0,8583)	(0,0228)***
R^2	=	0,3451;	Adj R^2 = 0,2548;	F.Stat = 3,8210;
Stat	=	0,0129		

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; ** Signifikan pada $\alpha = 0,05$; *** Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) pengaruh pendidikan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan upah terhadap kemiskinan sebesar 0.3451 artinya 34,51 % variasi variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan upah dan sisanya 65,49% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Hipotesis dalam Uji F yaitu H_0 : Model yang dipakai tidak eksis dan H_A : Model yang dipakai eksis. H_0 ditolak apabila nilai p (p-value) probabilitas F-statistik < α , dan H_0 tidak ditolak apabila nilai p (p-value) probabilitas F-Statistik > α . Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai p (p-value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F bernilai $0,0129 < 0,10$ sehingga H_0 ditolak dengan kesimpulan model yang dipakai eksis

Uji Validitas Pengaruh (Uji t)

.Variabel	t-statistik	Prob	Alfa	Kesimpulan
LnPend	-1,9234	0,0643	< 0,10	Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,10$
PE	1,1653	0,2534	> 0,10	Tidak berpengaruh signifikan
LnTK	0,1801	0,8583	> 0,10	Tidak berpengaruh signifikan
LnUMK	-2,4051	0,0228	< 0,10	Berpengaruh signifikan pada $\alpha = 0,10$

Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi pada data panel, dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel pendidikan adalah -0,0584 dan nilai probabilitasnya ($0.0643 < 0,10$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berarti bahwa setiap pendidikan naik 1 orang, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,0584 atau 1 jiwa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh diketahui Yuyun (2021) bahwa pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dengan koefisien regresi sebesar 727.456 dengan angka sig. sebesar 0.006 lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yakni 0.05 yang berarti terjadi hubungan yang signifikan. Kenaikan pendidikan sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 727.456 persen. begitupun sebaliknya jika pendidikan menurun sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 727.456 persen . namun penelitian tidak sejalan dengan penelitian pusparani (2022) Penelitian ini memperoleh hasil yang mengkonfirmasi pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi pada data panel, dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel upah minimum kabupaten adalah -0,3159 dan nilai probabilitasnya ($0.0228 < 0,10$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berarti bahwa setiap upah minimum kabupaten naik 1 rupiah, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar -0,3159 atau 3 jiwa. Hasil penelitian ini sejalan Masjkurib (2018) dengan Dari hasil regresi ditemukan bahwa upah minimum memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat jumlah penduduk miskin di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti kenaikan upah minimum sebesar 1

rupiah akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 4.51×10^{-2} jiwa. Semakin tinggi upah minimum akan memicu penurunan jumlah penduduk miskin Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Indradewa (2015) dan Pangastuti (2015) yang dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh yang negatif signifikan Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samuel Randy Tapparan yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan [17].

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode regresi data panel terdapat variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen dan dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil regresi data panel dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pendidikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, Tenaga Kerja memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dan variabel upah minimum kabupaten memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. pengaruh pendidikan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan upah terhadap kemiskinan sebesar 0.3451 artinya 34,51 % variasi variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pendidikan, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, dan upah dan sisanya 65,49% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Ucapan terima kasih

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tak lupa Saya ucapkan terimakasih kepada Allah yang sudah melancarkan skripsi saya dan untuk seluruh teman-teman saya yang sudah membantu dalam menyusun penelitian ini terutama kepada Wildan Alfa Sina Dan Reni Fitria Dew

References

- [1] Nigrum, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia," *Ecosains J. Ilm. Ekon. dan Pembang*, vol. 10, no. 2, 2007.
- [2] D. S. . Yuyun Telau, "Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara," *Ecosains J. Ilm. Ekon. dan Pembang*, 2020.
- [3] Pratama, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan DI Kabupaten Madiun," *J. Publ. ILMU Ekon. DAN Akunt.*, 2014.
- [4] E. A. Hafiz, "Pengaruh PDRB , UMK , IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja menopang kegiatan pembangunan yaitu adalah tenaga kerja," *Ecosains J. Ilm. Ekon. dan Pembang*, vol. 10, no. 2, pp. 106–114, 2020.
- [5] M. Sinaga, "Analysis of Effect of GRDP (Gross Regional Domestic Product) Per Capita, Inequality Distribution Income, Unemployment and HDI (Human Development Index) on Poverty," *Budapest Int. Res. Critics Inst. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 3, pp. 2309–2317, 2020, doi: 10.33258/birci.v3i3.1177.
- [6] E. M. Putri and D. Z. Putri, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia," *Ecosains J. Ilm. Ekon. dan Pembang.*, vol. 10, no. 2, pp. 106–114, 2021.
- [7] Amaluddin, R. W. Payapo, A. A. Laitupa, and M. R. Serang, "A Modified Human Development Index and Poverty in the Villages of West Seram Regency, Maluku Province, Indonesia," *Int. J. Econ. Financ. Issues*, vol. 8, no. 2, pp. 325–330, 2018.
- [8] E. Setyowati and S. T. Rahayu, "The role of syariah micro financial institution in reducing poverty," *Test Eng. Manag.*, vol. 82, no. 2–2, pp. 2233–2241, 2020.
- [9] Suryawati, "ANALISIS HUBUNGAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SUBSIDI DENGAN TINGKAT KEMISKINAN," *J. Kaji. Ekon. dan Kebijakan. Publik*, vol. 7, no. 1, 2022.
- [10] T. Hofmarcher, "The effect of education on poverty: A European perspective," *Econ. Educ. Rev.*, vol. 83, no. June, 2021, doi: 10.1016/j.econedurev.2021.102124.

Procedia of Social Sciences and Humanities

Proceedings of the 1st SENARA 2022

- [11] Surtipto and L. Subayil, "35-Article Text-93-1-10-20200425," *J. Ilm. Ekon. Pembang.*, vol. 1, no. 2, p. 127, 2020.
- [12] W. Astuti, "Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Study Kasus Wilayah Desa Parung Kab. Bogor)," *JENIUS (Jurnal Ilm. Manaj. Sumber Daya Manusia)*, vol. 1, no. 3, 2018.
- [13] Muammar Fazri Ramadhan & Reza Juanda, "Efektifitas pengaruh jumlah UMK dan upah minimum terhadap penyerapakan kerja di Indonesia," vol. 04, pp. 17–22, 2021.
- [14] D. Chayani, E. Sitanggang, U. S. Utara, I. P. Manusia, and T. Kerja, "DI PROVINSI SUMATERA UTARA ANALYSIS OF POVERTY INFLUENCE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND LABOR IN NORTH SUMATERA PROVINCE PENDAHULUAN Pada Hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidu," vol. 4, pp. 225–232, 2020.
- [15] N. Feriyanto, D. El Aiyubbi, and A. Nurdany, "THE IMPACT of UNEMPLOYMENT, MINIMUM WAGE, and REAL GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT on POVERTY REDUCTION in PROVINCES of INDONESIA," *Asian Econ. Financ. Rev.*, vol. 10, no. 10, pp. 1088–1099, 2020, doi: 10.18488/journal.aefr.2020.1010.1088.1099.
- [16] Gujarati & Poter, "Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat."